

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAH SWADAYA (BSPS) DI KELURAHAN BONTANG KUALA KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG

Halimah¹, Bambang Irawan², Cathas Teguh Prakoso³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk deskriptif kualitatif. Fokus penelitian untuk Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya antara lain : penetapan penerima BSPS, penyaluran bahan BSPS, pembinaan pelaksanaan BSPS, pemantauan, faktor penghambat dan faktor pendukung pada Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Key informan yaitu ketua tim teknis BSPS tahun 2016 Kota Bontang dari Dinas BAPPEDA, serta informan lainnya yaitu pendamping dari Kelurahan, (RT), cv/toko bangunan dan masyarakat penerima bantuan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2016 di Kelurahan Bontang Kuala mempunyai pengaruh yang positif terhadap masyarakat penerima bantuan, walaupun belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya rumah yang mendapatkan bantuan tersebut belum secara utuh tertutup dari kerusakan rumah yang ada. Dari keterbatasan anggaran yang ada, maka diharapkan peningkatan kualitas baik dari penambahan anggaran ataupun pelaksanaan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kata Kunci : implementasi kebijakan, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: halim_halimah15@gmail.com

keluarganya. Setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah, meskipun secara objektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginannya. Program-program pembangunan yang ada, dimana program sebuah pembangunan merupakan arah sebuah perubahan yang mampu merubah sesuatu hal yang bertujuan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Program pembangunan dalam hal ini, menjadikan suatu huniaan yang mana awalnya tidak layak huni menjadi layak huni. Program dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah-daerah yang mana terdapat masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni, menjadi hunian yang layak, yang nyaman untuk dijadikan huniaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Program BSPS yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar atau tidak layak huni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi dan APBD kota/kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak mengikat.

Program BSPS tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah munculnya rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong-royong di masyarakat yang kini mulai memudar. Selain itu, dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah layak huni.

Penanggung jawab pelaksana kegiatan untuk Program BSPS di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program BSPS dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di pedesaan, dan bantuan untuk masyarakat miskin di perkotaan. Bantuan Program BSPS yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di perkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan. Sedangkan untuk di Pedesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan. (Sumber: www.kemensos.go.id, Diakses pada Jumat, 24 Maret 2017).

Salah satu wilayah atau kota yang mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS yaitu Kota Bontang yang terletak pada Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang memiliki jumlah penduduk sekitar 163.326, dari jumlah penduduk tersebut terdapat 3 kecamatan dan 15 kelurahan.

Kelurahan Bontang Kuala adalah salah satu daerah yang mendapatkan bantuan bedah rumah atau dalam program pemerintah pusat yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan tersebut ditujukan pada rumah warga yang tidak layak huni atau tidak memenuhi syarat menjadi tempat tinggal. Penduduk pada Kelurahan Bontang Kuala adalah 4.268 dengan jumlah KK (rumah tangga) sebanyak 1.491 KK. Rumah tidak layak huni (RTLH) di kelurahan Bontang kuala yaitu 118. Besaran bantuan yang diterima setiap warga tergantung dari kerusakannya. Karena stimulan maka diberikan bahan bangunannya berupa material dan tidak berupa uang. (Sumber: www.bontangpost.com, Diakses pada Selasa, 23 Agustus 2016). Pembagian kelompok yang dilakukan di pendopo Kantor Lurah Bontang Kuala, yang bertujuan untuk memantau bahwa material yang diberikan tersebut benar digunakan dan tidak diperjualbelikan. Karena BSPS ini pengerjaan perbaikannya dilakukan secara swadaya. Penerima BSPS ini pun, merupakan masyarakat yang masuk dalam Rumah Tangga Miskin (RTM) dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Namun dalam pelaksanaannya, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bontang, khususnya Kelurahan Bontang Kuala belum berjalan secara optimal. Dalam penilaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ada tingkatan yang perlu diperhatikan dalam sebuah komponen bangunan yaitu, kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat. Dari tiga komponen tersebut, setiap bangunan memiliki kerusakan yang berbeda-beda dan menunjukkan bahwa penilaian kerusakan pada bangunan yang ringan, sedang maupun berat mengisyaratkan besaran biaya dalam peningkatan kualitas bangunan untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan yang terkait dengan Program BSPS. Pada tahun 2016 masyarakat Kelurahan Bontang Kuala mendapatkan bantuan untuk 30 rumah warga masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Dari 30 rumah yang mendapatkan bantuan tersebut, masing-masing masyarakat yang mendapatkan bantuan dengan biaya Rp. 15. 000.000,- dalam bentuk material dan bukan uang. Besaran biaya yang didapatkan tersebut, menurut tingkat komponen kerusakan mengarah pada kerusakan ringan, bukan tidak memperhatikan dua

indikator dalam penilaian kerusakan bangunan, namun dengan keterbatasan anggaran maka pemerataan pada setiap indikator pada kerusakan rumah baik itu berat, sedang, dan ringan biaya bantuan yang di berikan adalah Rp. 15.000.000,- dan apabila biaya tersebut kurang pada kerusakan yang lebih maka biaya swadaya yang dilakukan masyarakat. Dari jumlah tersebut dengan keterbatasan anggaran dalam merenovasi, maka rumah yang memiliki permasalahan, yang melebihi besar biaya yang didapat tidak terselesaikan dengan apa yang diharapkan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya rumah yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, belum selesai secara sempurna. Dari kondisi tersebut, maka penulis tertarik ingin meneliti bagaimana implementasi yang terlaksana, karena apapun bentuknya tujuan Program BSPS ini yaitu untuk meningkatkan kualitas rumah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian peneliti adalah mengenai “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang”.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang bisa dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Istilah ini dikemukakan oleh William Dunn dalam Abidin (2002:4).

Sedangkan pengertian kebijakan sendiri menurut Dye dijelaskan bahwa: “Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda”.(Nugroho, 2012:119)

Menurut Amir Santoso dalam Winarno (2002:17) kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun kebijakan itu meliputi tiga unsur penting yaitu:

1. Suatu program kebijakan yang mengandung nilai-nilai tertentu dan kegiatannya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu
2. Kebijakan itu sebagai penetapan program
3. Pengaruh dari pada kebijakan berlaku terhadap sejumlah besar orang atau punya kekuatan besar untuk mempengaruhi kekuatan orang lain.

Sebagai sebuah sistem yang berdiri atas sub sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif, dari struktur kebijakan dan dari proses kebijakan. Abidin (2004:45) menyatakan bahwasanya terdapat lima unsur dari suatu kebijakan bila dilihat dari perspektif strukturnya :

1. Tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan umum terdapat kriteria tentang tujuan yang baik dari suatu kebijakan, yaitu: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistik (*rational or realistische*), jelas (*clear*) dan berorientasi kedepan (*future oriented*).
2. Masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu metode pemecahan suatu masalah kebijakan bilamana pemecahannya dilakukan pada masalah yang tidak benar. Dengan kata lain, bila suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat, maka peluang penyelesaian masalah kebijakan akan semakin potensial.
3. Tuntutan (*demand*) telah diketahui bahwa partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi tersebut dapat berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan, atau kritik. Seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan, gerakan masyarakat, dan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan tersebut.
4. Dampak (*outcomes*). Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Pada perkembangannya, dampak yang terjadi pada publik akan dijadikan sebagai rujukan evaluasi bagi formulasi dan pengembangan kebijakan publik berikutnya.
5. Sarana atau alat kebijakan (*policy instrument*). Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai dimaksud guna mencapai kontak langsung dengan masyarakat sebagai titik berat perhatian kebijakan. Beberapa dari sarana kebijakan antara lain :
 - a. Kekuasaan (*power*)
 - b. Insentif
 - c. Pengembangan kemampuan
 - d. Simbolis
 - e. Modifikasi atau perubahan kebijakan itu sendiri

Implementasi Kebijakan Publik

Dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan publik terhadap beberapa model implementasi kebijakan. Menurut Gorgin dalam Indiahono (2009:45) mengemukakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan dengan model Gorgin, maka perlu didefinisikan variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi yakni:

1. Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi.
2. Kemampuan organisasi dengan sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

3. Pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasi.

Ada juga model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2009:96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor *communications*, *resources*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure*, yaitu :

- a. Komunikasi (*communication*), diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Sumber daya (*resources*). Edward III dalam Widodo (2009:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa “ Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
- c. Disposisi (*disposition*). Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaksana kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.
- d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Struktur birokrasi merupakan variabel kedua yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi mencakup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan intra dan extra organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dimensi struktur birokrasi ini dibagi menjadi dua macam, yakni dimensi fragmentasi dan dimensi *standard operating procedure* (SOP).

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program BSPS adalah sebuah program yang mana BSPS adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan rumah yang layak huni. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan.

14 kriteria miskin menurut standar BPS, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari $8m^2$ perorang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbai/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/politik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan $500m^2$, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.

Syarat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) 2016, yaitu:

1. WNI
2. Memiliki atau menguasai tanah namun belum memiliki rumah
3. Memiliki/menempatkan rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni
4. Belum pernah memperoleh bantuan rumah dari pemerintah

5. Berpenghasilan sebanyak-banyaknya 30% di atau upah minimum provinsi setempat
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencan membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya
7. Bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan BSPS
8. Bersedia membentuk kelompok dan bersedia mengikuti ketentuan BSPS.

Program BSPS dilaksanakan di daerah yang masyarakatnya masih memiliki rumah yang tidak layak huni, baik itu di perkotaan maupun di perdesaan. Penanggung jawab kegiatan untuk program BSPS di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program BSPS dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di pedesaan, dan bantuan untuk masyarakat miskin perkotaan. Untuk bantuan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di perkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk di perdesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program tersebut berbentuk dana stimulan yang anggarannya berasal dari APBD Kota/Kabupaten, Provinsi maupun dari APBN. Program ini memberikan bantuan berupa rehabilitasi rumah kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Bantuan program BSPS bersifat stimulan sehingga hanya untuk pemugaran/renovasi, bukan untuk merehab total bangunan rumah. Maksud dan tujuan dari program bantuan stimulant perumahan swadaya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Tujuan lain dari program ini adalah untuk menumbuhkan kembali rasa kesetiakawanan sosial dan gotong royong di masyarakat yang kini mulai pudar. Sehingga tergugah untuk membantu masyarakat miskin yang mendapatkan program tersebut agar dapat meringankan beban mereka.

Program rumah swadaya ini merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang didasarkan pada Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor: 39/PRT/M/2015 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permen PERA) Nomor: 06 Tahun 2013. Dana BSPS disalurkan melalui rekening penerima bantuan yang dibuat oleh masing-masing penerima berdasarkan SK PPK-BRS. Dana tersebut langsung dibelanjakan bahan bangunan pada toko yang telah ditunjuk oleh penerima bantuan secara berkelompok (Kelompok Penerima Bantuan), sesuai Permen PUPR Nomor: 39/PRT/M/2015 pasal 21 angka (1). Adapun jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dibagi

menjadi dua yakni untuk peningkatan kualitas (PK) maksimum sebesar Rp 15.000.000,- dan pembangunan baru (PB) maksimum Rp 30.000.000,- (Sumber: www.pu-net.go.id, Diakses pada Sabtu, 23 Maret 2017).

Kesejahteraan

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial karena hampir semua yang kita lakukan dalam hidup ini berkaitan dengan orang lain (Jones,2009). Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut Midgley (2000), mendefinisikan kesejahteraan sosial ini diartikan sebagai “*a condition or state of human well-being*” kondisi sejahtera terjadi manakalah kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta manakalah manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Berdasarkan definisi kesejahteraan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suud, 2006)..

Menurut Durham (dalam Suud 2006:7), kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang, seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, dan kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan penduduk yang lebih luas.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Okamura (dalam Takehara 2005:114), menjabarkan bahwa ada tujuh karakteristik didalam kesejahteraan sosial yaitu:

1. Tuntutan ekonomi yang stabil
2. Tuntutan pekerjaan yang layak
3. Tuntutan keluarga yang stabil
4. Tuntutan jaminan kesehatan
5. Tuntutan jaminan pendidikan
6. Tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat
7. Tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi

Hal-hal diatas menjadi tuntutan dasar dalam masyarakat sosial. Ketika semua karakteristik atau tuntutan dasara dalam kehidupan bermasyarakat sudah terpenuhi secara otomatis kesejahteraan sosial dapat terpenuhi.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Secara harfiah menurut Poerwadarminta dalam Bambang Rustanto (2015:1), kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup :

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif dimaksud mendiskripsikan fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Moleong (2007:6) metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradly dalam Sugiyono (2009:208) menyatakan bahwa “ *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*”. Maksudnya adalah bahwa fokus ini merupakan dominan tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dalam rangka penulisan penelitian di perlukan adanya fokus penelitian yang bisa mempermudah penulis dalam melakukan penelitian untuk mengambil data serta mengolahnya sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Fokus penelitian juga sangat penting, untuk dijadikan pedoman atau saran dalam menentukan atau membuat langkah-langkah dalam penelitian.

Sesuai dengan uraian dan pendapat yang telah di paparkan, maka sub fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS)
 - a. Penetapan calon penerima bantuan
 - b. Penyaluran BSPS
 - c. Pembinaan pelaksanaan BSPS
 - d. Pemantauan
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

Untuk memperoleh dan menghimpun/mengumpulkan data sesuai dengan judul penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik atau cara pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan teknik pengumpulan data yang akurat di lapangan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian keperpustakaan (*library research*), yaitu :

Metode pengumpulan data dengan mencari data berdasarkan literature dan buku-buku yang relevan, dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan izinnya yang berhubungan dengan penelitian, serta itu juga mendasari berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di buat dan mempelajari literature-literature serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

2. Penelitian lapangan (*field work reseach*), yaitu :

Metode pengumpulan data dengan terjun langsung pada objek atau pengambilan data di lapangan. Pada metode ini dilakukan kegiatan interview, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada informan yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan informasi yang relevan dengan peneliti.

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian di lapangan penulis menggunakan beberapa cara antara lain :

- a. Observasi. Observasi (*observation*)
- b. Wawancara.
- c. Studi dokumentasi (*documention*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2016 di Kelurahan Bontang Kuala telah terlaksana. Dengan adanya proses penetapan penerima bantuan, penyaluran bahan bantuan, pembinaan pelaksanaan, dan proses pemantauan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam Implementasi Program BSPS di Kelurahan Bontang Kuala bahwa pada tahun 2016 penerima BSPS di Kelurahan Bontang Kuala sebanyak 30 orang per-KK yang tersebar dalam 20 Rukun Tetangga (RT). Maka masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni dan terbatasnya anggaran yang ada. Ketidaksesuaian antara penilaian kerusakan rumah dengan jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap penerima bantuan rumah tidak layak huni mengakibatkan rumah penerima bantuan tidak bisa tertutup secara sempurna. Terbatasnya anggaran yang tersedia maka pemerataan besar bantuan untuk setiap rumah atau penerima bantuan diratakan walaupun kerusakan setiap rumah berbeda-beda.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Menurut Widodo (2009:88) implementasi adalah suatu proses melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta individu dan kelompok.

Tingkat keswadayaan dalam program bantuan ini bisa dikatakan masih kurang. Terbatasnya ahli tukang di setiap kelompok penerima bantuan, membuat penerima bantuan yang menginginkan cepatnya perbaikan atau terbangunnya rumah, maka dengan kesanggupan membayar tukang yang tidak dalam kelompok penerima bantuan dilakukan tanpa menunggu ahli tukang yang ada pada masing-masing kelompok penerima bantuan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Bontang Kuala pada Tahun 2016 terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dan ada yang menjadi faktor pendukung dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Bontang Kuala pada Tahun 2016 yaitu : kurangnya partisipasi kelompok penerima bantuan dalam tingkat keswadayaan, Faktor minimnya tukang atau ahli bangunan, disposisi tenaga fasilitator lapangan, Kurangnya anggaran dan faktor pendukung dalam program BSPS ini adalah persyaratan yang sedikit dan tanpa dibebani biaya, ketersediaan anggaran dan pelayanan yang profesional.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sudah berjalan dengan baik. Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, berikut penjelasannya:

- a. Dalam proses penetapan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah terlaksana sesuai pedoman pelaksanaan program. Penetapan penerima bantuan yang dilaksanakan dan ditetapkan baik oleh RT, pihak kelurahan, tim teknis kota dan tim provinsi yang memverifikasi data penerima sesuai dengan persyaratan dan melakukan survei langsung. Tidak tepat sasaran dalam penetapan penerima bantuan mampu diatasi dengan adanya survei langsung ke lapangan dengan melihat rumah-rumah para penerima bantuan untuk memverifikasi ulang data-data penerima bantuan, sebelum penetapan secara pas dan sebelum penyaluran bahan bantuan.
- b. Penyaluran bahan bantuan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Bontang Kuala khususnya para penerima bantuan yang bertempat tinggal dalam perumahan apung sudah terlaksana dan tersedia, walau kendalanya yang tidak secara tepat atau langsung pengantaran bahan bantuan kesetiap penerima bantuan yang dikarenakan tidak bisa masuknya mobil pengangkut bahan bantuan, sehingga bahan bantuan ditempatkan pada area parkir perumahan apung Bontang Kuala. Dalam penyaluran bahan bantuan, fasilitator menunjuk toko bangunan atau cv sebagai tempat penyedia bahan bangunan dan yang menyalurkan bahan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima bantuan dengan pengawasan fasilitator lapangan.
- c. Pada proses pembinaan pelaksanaan program BSPS sudah terlaksana dan berjalan baik, dimana dalam proses pembinaan pelaksanaan program BSPS ini dilakukan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, dan atau pendampingan penerima BSPS. Bentuk sikap pelaksana dalam pelaksanaan pembinaan mendapatkan respon positif dan sangat membantu masyarakat penerima bantuan, dimana para penerima bantuan memahami apa saja yang menjadi persyaratan yang harus dimengerti dan kebutuhan apa saja yang diperlukan pada setiap kerusakan rumah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- d. Pada pemantauan telah terlaksana, namun belum sepenuhnya peran fasilitator lapangan berperan secara sempurna. Pemantauan hanya dilakukan sekali saja dan fasilitator hanya melakukan pemantauan diawal proses pembangunan. Fasilitator yang seharusnya melakukan pemantauan secara teratur justru tidak melakukan perannya dengan maksimal.
- e. Faktor-faktor pendukung dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah kemudahan dalam

melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, pelayanan yang profesional, ketersediaan anggaran. Sementara faktor penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah masih kurangnya keswadayaan masyarakat, sedikitnya tukang/ahli bangunan yang ada disetiap penerima bantuan, peran fasilitator yang kurang, dan kurangnya anggaran atau biaya bantuan dalam melakukan perbaikan atau pembangunan rumah yang tidak layak huni.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran yang dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bontang dapat berjalan secara maksimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Dikarenakan faktor penghambat ialah tingkat keswadayaan masyarakat yang kurang, maka perlunya penegasan dalam menyampaikan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh para penerima bantuan agar bisa lebih bersikap swadaya, bekerjasama atau sikap gotong-royong dalam hal pembangunan atau perbaikan rumah yang mendapatkan bantuan dengan cara membantu satu sama lain disetiap kelompok penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
2. Selanjutnya faktor penghambat adalah tukang atau ahli bangunan yang masih kurang dan minimnya pemahan dalam bertukang di setiap kelompok penerima bantuan pada program BSPS. Dengan cara penambahan biaya khusus 15% yang diperuntukan untuk biaya tukang atau ahli bangunan dapat mempermuda dan membantu proses penyelesaian rumah dalam batas waktu yang tepat.
3. Berdasarkan penelitian ini, masih adanya rumah yang tidak layak huni dan terbatasnya biaya atau anggaran bantuan. Penambahan jumlah biaya atau anggaran dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangatlah diperlukan maka dengan cara peningkatkan biaya anggaran pendapatan baik dari APBN, APBD provinsi dan APBD kota/kabupaten dapat menambah biaya atau anggaran bantuan pada program BSPS sehingga pencapaian tujuan dalam program BSPS dan pencapain kebutuhan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang aman dan layak huni secara keseluruhan.
4. Agar pemahaman pelaksana kegiatan lebih maksimal terhadap implementasi program maka peningkatan wawasan dari pelaksana kegiatan seperti pihak kelurahan sebagai pendamping, tim teknis kota, baik pendamping atau pembina program, fasilitator lapangan untuk lebih memahami mengenai program BSPS dan memahami kewenangannya masing-masing, maka dengan cara memberikan pelatihan atau bimbingan secara optimal tentang pelaksanaan Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat membantu pemahan setiap pelaksana kegiatan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik: Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamis Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Rustanto, Bambang. 2015. Menagani Kemiskinan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suud, Mohammad. 2006. 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Pustaka Publisher.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
-
-